

OPTIMALISASI FUNGSI BPBD UNTUK MITIGASI BENCANA BANJIR DI BANDAR LAMPUNG

Regina Alyani Falah¹, Sri Sulastuti², Agung Budi Prastyo³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung

reginaalyanifalah09@gmail.com¹, tutiunila@gmail.com², agung.praстыo@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam menghadapi banjir sebagai salah satu ancaman terbesar, terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Bandar Lampung. Banjir di wilayah ini kerap dipicu oleh luapan Sungai Way Sekampung dan Way Tahun akibat curah hujan ekstrem, buruknya sistem drainase, serta konversi lahan yang semakin tidak terkendali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memegang tanggung jawab utama dalam upaya mitigasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yang mencakup perencanaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal karena terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan kurangnya pemanfaatan teknologi peringatan dini yang akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah fungsi BPBD Kota Bandar Lampung secara menyeluruh, mulai dari tataran regulasi nasional hingga praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan struktural seperti fragmentasi data, mekanisme koordinasi yang tidak efektif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan banjir. Temuan ini menjadi dasar untuk merumuskan strategi reformasi berbasis prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, kolaborasi antarlembaga, dan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat efektivitas mitigasi banjir di masa mendatang.

Keywords: *BPBD, Optimalisasi Fungsi, Mitigasi Banjir, Bandar Lampung*

A. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakter geografisnya yang beragam dan kompleks, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, wilayah pesisir, hingga daerah pegunungan. Letak Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia serta berada dalam iklim tropis semakin memperbesar peluang terjadinya berbagai bencana alam. Gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, kekeringan, hingga tsunami menjadi ancaman yang dapat muncul kapan saja sebagai konsekuensi dari kondisi alam tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai suatu peristiwa yang berpotensi mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat. Peristiwa ini dapat dipicu oleh berbagai sumber, baik dari faktor alam, faktor nonalam, maupun aktivitas manusia.¹ Dampaknya pun sangat luas, mulai dari timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, hingga munculnya tekanan dan gangguan psikologis bagi masyarakat yang terdampak.² Definisi ini menegaskan bahwa bencana bukan sekadar kejadian fisik, tetapi juga fenomena sosial yang mempengaruhi kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Salah satu bencana yang paling sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia adalah banjir. Di kawasan perkotaan, masalah ini muncul akibat perpaduan antara faktor alam dan faktor manusia. Dari sisi alam, intensitas curah hujan yang tinggi sering kali membuat volume air melebihi kapasitas tampungan lingkungan. Namun, penyebab banjir tidak hanya berhenti di situ. Berbagai aktivitas manusia turut memperburuk kondisi tersebut. Sistem drainase yang tidak memadai atau tersumbat membuat air sulit mengalir dengan baik, sementara alih fungsi lahan yang tidak terencana mengurangi

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana” (2007).

² Khoirun Nisa and Hendra Try Ardianto, “STRATEGI MITIGASI BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM UPAYA MENANGGULANGI BANJIR DI KABUPATEN PATI,” *Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro* 1, no. 1 (2024).

area resapan air yang seharusnya membantu menahan limpasan.³ Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan menyebabkan sampah menumpuk di saluran air dan memperbesar risiko banjir. Kombinasi dari berbagai faktor ini menjadikan banjir sebagai persoalan yang hampir setiap tahun menghampiri wilayah perkotaan di Indonesia, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan terintegrasi.

Di Kota Bandar Lampung, banjir menjadi salah satu masalah yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh tingginya curah hujan, tetapi juga diperparah oleh buruknya sistem drainase yang tidak mampu menampung aliran air dalam jumlah besar. Konversi lahan yang masif, termasuk berkurangnya area resapan air akibat pembangunan pemukiman dan kawasan komersial, turut memperparah situasi. Akibatnya, ribuan rumah terendam dan aktivitas warga terganggu secara signifikan. Genangan air yang meluas tidak hanya merusak hunian dan barang milik warga, tetapi juga berdampak pada kesehatan, mobilitas, serta perekonomian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah banjir di Bandar Lampung membutuhkan penanganan yang lebih terencana dan berkelanjutan agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung merupakan lembaga daerah yang memegang peran penting dalam upaya penanggulangan bencana. Tugas dan kewenangannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Dalam kerangka regulasi tersebut, BPBD bertanggung jawab menyusun perencanaan, melaksanakan berbagai program penanganan dan mitigasi, serta melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan kebencanaan di daerah.⁴ Namun, pelaksanaan fungsi BPBD Lampung belum berjalan secara maksimal. Berbagai kendala

³ Dwi Jati Marta and Tika Pustika Fersari, "Manajemen Bencana Banjir Dalam Meningkatkan Ketahanan Wilayah Oleh BPBD Kota Semarang," *JURNAL RIPTek* 19, no. 1 (2025): 46, <http://ripteck.semarangkota.go.id>.

⁴ Aditiya Setiawan et al., "Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan," *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan* 10, no. 1 (2024): 42–48, <https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/index.php/identifikasi>.

struktural dan teknis masih menghambat kinerjanya. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas membuat pelaksanaan program tidak selalu sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan anggaran yang minim juga membatasi ruang gerak lembaga ini dalam melakukan penguatan kesiapsiagaan dan respons cepat. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang seharusnya menjadi kunci dalam manajemen bencana masih lemah, sehingga penanganan di lapangan sering kali tidak terpadu. Hambatan lain terlihat dari rendahnya pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi berbasis data yang dapat mempercepat deteksi risiko, seperti sistem peringatan dini. Keterlambatan dalam modernisasi teknologi ini berdampak pada kurang optimalnya langkah antisipasi, padahal mitigasi berbasis data sangat penting di daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi seperti Lampung. Situasi tersebut tidak hanya menunjukkan belum terpenuhinya prinsip *good governance* dalam pengelolaan bencana.

Tanpa penguatan kapasitas BPBD secara menyeluruh, penanggulangan bencana berpotensi tidak efektif dan masyarakat akan tetap berada dalam kondisi rentan ketika bencana terjadi. Atas dasar berbagai permasalahan tersebut, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menelusuri lebih jauh bagaimana optimalisasi fungsi BPBD dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan kondisi secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta dan karakteristik kelompok yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran BPBD Kota Bandar Lampung dalam mengelola risiko banjir. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada strategi yang telah diterapkan BPBD, hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana langkah-langkah tersebut memberikan dampak bagi masyarakat. Dengan menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi di lapangan, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap mengenai efektivitas BPBD dalam mitigasi bencana banjir serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Fungsi BPBD Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Terkait

Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berpegang pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam setiap tahap kegiatannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tindakan yang cepat dan tepat, penetapan prioritas yang jelas, koordinasi serta keterpaduan antarinstansi, pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses. Selain itu, penanggulangan bencana juga menekankan pentingnya kemitraan dengan berbagai pihak, pemberdayaan masyarakat, pendekatan yang nondiskriminatif, dan penghormatan terhadap nilai-nilai nonproletisi. Tujuan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.⁵ Upaya ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses penanggulangan berjalan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penanggulangan bencana juga harus selaras dengan budaya lokal serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya.

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup berbagai aspek yang harus dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengurangan risiko bencana serta memasukkan langkah-langkah pengurangan risiko tersebut ke dalam program pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah harus memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat dari berbagai dampak bencana, termasuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para pengungsi secara adil sesuai standar pelayanan minimum. Pemerintah juga bertanggung jawab memulihkan kondisi wilayah dan masyarakat yang terdampak bencana melalui berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari sisi pendanaan, pemerintah wajib menyediakan anggaran penanggulangan bencana

⁵ Biyan Anugrah Awusi, Herman Nayoan, and Jones Tompodung, "KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MANADO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA BANJIR," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).

secara memadai melalui APBN, termasuk menyiapkan dana siap pakai yang dapat digunakan segera ketika situasi darurat terjadi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara arsip serta dokumen resmi yang berisi informasi mengenai berbagai ancaman dan dampak bencana. Keberadaan dokumen ini sangat penting karena menjadi dasar rujukan dalam proses perencanaan dan evaluasi penanggulangan bencana di masa mendatang. Data yang tersimpan dengan baik memungkinkan pemerintah menyusun strategi yang lebih akurat, memperbaiki kekurangan dari penanganan sebelumnya, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan. Pada tingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berfungsi sebagai lembaga yang memberikan arahan menyeluruh terhadap seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fungsi ini meliputi langkah pencegahan sebelum bencana terjadi, penanganan tanggap darurat ketika bencana berlangsung, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan setelah kondisi mulai pulih. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan secara adil dan setara bagi seluruh wilayah Indonesia. BNPB juga memiliki wewenang penting dalam menetapkan standar dan kebutuhan teknis yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁶ Adanya standar yang jelas membuat setiap tahapan penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di tingkat daerah pada hakikatnya fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana mencakup tiga fase utama yang saling berkesinambungan dan membentuk satu rangkaian kerja yang utuh. Pada fase prabencana, BPBD menjalankan fungsi pencegahan melalui pemantauan kondisi cuaca dan tingkat kerawanan wilayah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan, serta menerapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi potensi risiko. Tahap ini menjadi fondasi penting karena menentukan seberapa siap pemerintah dan masyarakat dalam

⁶ Syuryansyah, Sukendar, and Ditta Andini, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Manajemen Bencana Di Tanjung Lesung," *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* 11, no. 1 (2023): 69–79, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i1.150>.

menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Pada fase tanggap darurat, fungsi BPBD beralih pada penanganan langsung di lapangan. BPBD bertugas melakukan penyelamatan dan evakuasi, memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, menyediakan tempat pengungsian, serta memberikan layanan kesehatan yang diperlukan. Kecepatan dan ketepatan dalam tahap ini sangat menentukan untuk meminimalkan korban dan mengendalikan situasi.⁷ Setelah kondisi darurat teratasi, fungsi BPBD masuk ke fase pascabencana yang berfokus pada pemulihan menyeluruh. Kegiatan ini mencakup perbaikan lingkungan yang rusak, pembangunan kembali sarana dan prasarana, serta pemulihan sosial masyarakat agar aktivitas sehari-hari dapat kembali normal. BPBD juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dan masyarakat memperoleh dukungan selama proses pemulihan berlangsung.

BPBD merupakan lembaga pemerintah daerah yang memegang fungsi penting dalam mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana. Dalam menjalankan tugas ini, BPBD tidak bekerja sendiri. Lembaga ini membangun kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk dinas teknis, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, untuk memastikan setiap langkah penanggulangan bencana dilakukan secara terarah dan terintegrasi. Salah satu tugas utama BPBD adalah melakukan pemantauan rutin terhadap titik-titik yang memiliki kerawanan tinggi, seperti daerah bantaran sungai, kawasan perbukitan, dan wilayah pemukiman yang sering terdampak banjir atau longsor. Pemantauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum situasi berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Selain pemantauan, BPBD juga menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan dasar penanggulangan bencana, simulasi evakuasi,

⁷ Josua Kurniawan Ivo Bria, Petrus Kase, and Mariayani O. Rene, "PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN MALAKA PADA TAHUN 2024," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik 3* (2025): 139–56.

pembentukan komunitas siaga bencana, serta edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dan mandiri dalam menghadapi risiko bencana. Program pemberdayaan ini sekaligus menjadi media efektif untuk menyebarkan informasi terkait potensi bahaya, prosedur keselamatan, dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan secara mandiri.⁸ Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, proses pengurangan risiko bencana dapat berjalan lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan mampu memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana. Secara nyata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung memegang fungsi yang sangat strategis sebagai pelaksana, koordinator, dan pengendali utama dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Fungsi tersebut berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama Pasal 11 dan Pasal 33, yang menugaskan pemerintah daerah untuk menyusun langkah mitigasi, melaksanakan penanganan darurat secara cepat, serta menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi.

Kedudukan BPBD semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Regulasi ini mewajibkan BPBD menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah atau RPBPD dengan berlandaskan analisis risiko yang komprehensif. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, analisis tersebut mencakup risiko banjir yang sering dipicu oleh luapan Sungai Way Sekampung, sehingga penyusunan rencana harus benar-benar sesuai dengan karakteristik ancaman di wilayah tersebut. Proses penyusunan RPBPD tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung kesiapsiagaan daerah. BPBD melakukan pemantauan hidrologi terhadap debit sungai, menilai kondisi titik-titik rawan banjir, dan menyelenggarakan simulasi evakuasi agar masyarakat

⁸ Sri Heryati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana," *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* 2, no. 2 (2020): 139–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>.

terbiasa dengan prosedur penyelamatan diri saat bencana terjadi. Kegiatan ini menjadi dasar penting untuk membangun sistem peringatan dan respons yang lebih efektif. Dengan landasan hukum yang kuat serta kewenangan yang jelas, BPBD diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengelola risiko banjir. Lembaga ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika ancaman bencana yang terus berubah, serta responsif dalam menghadapi keadaan darurat. Kehadiran BPBD menjadi kunci bagi terbangunnya sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

2.2 Upaya dan Hambatan Optimalisasi Fungsi BPBD dalam Mitigasi Banjir

Dalam upaya pencegahan bencana banjir, terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi maupun mencegah dampak yang ditimbulkan. Dalam rangka menghadapi berbagai ancaman banjir, pengembangan strategi penanganan bencana menjadi langkah krusial yang tidak dapat diabaikan. Salah satu strategi yang paling penting adalah pelaksanaan upaya mitigasi yang dirancang secara efektif dan berkelanjutan. Mitigasi bencana banjir pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi, membatasi, atau bahkan mencegah risiko yang dapat timbul akibat banjir. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan infrastruktur dan tata ruang, hingga penyediaan informasi dan sistem peringatan dini yang akurat. Mitigasi tidak hanya berfokus pada tindakan sebelum bencana terjadi, tetapi juga membangun pola pikir kesiapsiagaan agar masyarakat dan pemerintah daerah mampu meminimalkan dampak yang mungkin muncul ketika banjir melanda. Secara umum, optimalisasi fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia dalam mitigasi banjir masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan landasan yang jelas mengenai peran dan kewenangan BPBD, implementasinya di lapangan sering kali terhambat oleh kondisi struktural yang kompleks.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan terbesar, terutama karena kebutuhan mitigasi banjir tidak hanya mencakup aspek teknis seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan alat peringatan dini, tetapi juga aspek sosial seperti edukasi, pelatihan masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah. Di samping itu, koordinasi lintas sektor yang idealnya menjadi tulang punggung keberhasilan mitigasi sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPBD harus bekerja berdampingan dengan berbagai instansi seperti dinas pekerjaan umum, dinas lingkungan hidup, badan meteorologi, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Salah satu langkah penting yang dapat ditempuh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung adalah memaksimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Langkah ini bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dipahami, diakses, dan digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk bertindak sebelum ancaman banjir terjadi. Karena itu, efektivitas penyebaran informasi menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran, kewaspadaan, serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Dalam pelaksanaannya, BPBD tetap mengacu pada prinsip optimalisasi, yaitu upaya untuk memaksimalkan manfaat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Prinsip ini tidak hanya menekankan pada kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga ketepatan, jangkauan, dan kualitas pesan yang disebarkan.

Optimalisasi ini diwujudkan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal, seperti penguatan jaringan komunikasi publik, peningkatan kualitas perangkat teknologi penyebaran informasi, serta aktivasi berbagai kanal komunikasi yang dapat menjangkau kelompok masyarakat secara luas, mulai dari media sosial, situs resmi pemerintah, pengeras suara lingkungan, hingga koordinasi dengan aparat desa dan relawan kebencanaan. Selain itu, BPBD juga perlu memastikan bahwa setiap kanal informasi digunakan sesuai karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran.⁹

⁹ Muhammad Pardan Hamka, "Optimalisasi Penyebaran Informasi Dalam Pencegahan Banjir Di Kota Bandar Lampung Povinsi Lampung," *IPDN Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*, 2023, <http://eprints.ipdn.ac.id/14296/>.

\Melalui pendekatan optimalisasi tersebut, penyebaran informasi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas rutin, tetapi sebagai strategi kunci yang dapat menentukan keberhasilan mitigasi banjir secara keseluruhan. Informasi yang disampaikan BPBD Kota Bandar Lampung pada dasarnya memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena didukung oleh penggunaan berbagai alat dan instrumen kebencanaan. Informasi resmi tersebut seharusnya menjadi rujukan utama ketika bencana terjadi. Namun, pada praktiknya, kepercayaan masyarakat kerap bergeser ke sumber-sumber informal seperti pesan berantai, kabar dari mulut ke mulut, atau tanda-tanda alam yang mereka yakini. Seperti contoh terkait fenomena ini terlihat jelas pada peristiwa tsunami tahun 2018. Saat itu, BPBD Kota Bandar Lampung telah memberikan penjelasan bahwa tidak akan terjadi tsunami susulan di wilayah Teluk Betung.

Meski demikian, banyak warga justru mempercayai informasi tidak resmi yang mereka terima melalui media sosial. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tetap memilih mengungsi ke kantor Gubernur Provinsi Lampung karena diliputi rasa takut dan ketidakpastian. Situasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi mitigasi bencana bukan hanya soal memberikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap sumber informasi resmi.¹⁰ Dalam upaya mengoptimalkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung untuk mitigasi banjir, berbagai hambatan struktural dan operasional muncul secara nyata, menciptakan lingkaran ketidakefisienan yang sulit diputus. Kondisi ini dapat dibayangkan seperti sebuah tim penyelamat yang telah memiliki komitmen tinggi dan kesiapan penuh, namun masih terkendala oleh keterbatasan peralatan dasar, minimnya pelatihan teknis, serta fasilitas penunjang yang belum memadai. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghalang utama karena jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah rawan banjir yang harus diawasi. Selain itu, kualitas SDM yang belum merata, terutama dalam aspek kemampuan teknis, penggunaan teknologi terkait bencana, hingga

¹⁰ Vito Frasetya et al., “KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG,” *Jurnal Komunika* 4, no. 1 (2021): 1–18, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika>.

kemampuan komunikasi efektif kepada masyarakat, semakin mempersempit ruang gerak BPBD dalam menjalankan fungsi mitigasi secara optimal.

Hambatan yang ada ini semakin rumit oleh faktor geografis seperti topografi dataran rendah dan luapan sungai besar, di mana BPBD provinsi kesulitan mengoordinasikan kabupaten/kota dengan anggaran konsolidasi terbatas serta infrastruktur data yang terpisah-pisah, sebagaimana tercermin dalam kajian risiko bencana daerah yang menyoroti kelemahan evaluasi pasca-bencana. Sosialisasi masyarakat pun terfragmentasi, dengan kelurahan siaga bencana yang minim aktif akibat dana operasional rendah dan resistensi budaya lokal yang belum diubah menjadi program struktural. Selain itu, anggaran daerah yang cenderung terjebak dalam siklus penanganan darurat menyebabkan upaya mitigasi jangka panjang sulit diwujudkan. Keterbatasan dana membuat pengadaan peralatan penting seperti sensor hidrologi real-time atau drone berbasis GIS untuk memantau kondisi drainase di Sungai Way Sekampung dan Way Tahun tidak dapat direalisasikan serta semakin parah ketika koordinasi antarinstansi tidak berjalan efektif. Kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, yang seharusnya berperan dalam normalisasi saluran air, sering kali tidak sinkron, begitu pula dengan Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab terhadap pengawasan perizinan bangunan di area rawan banjir. Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi masalah yang tidak kalah penting. Sosialisasi mitigasi yang dilakukan BPBD masih bersifat sporadis, tidak merata, dan belum sepenuhnya inklusif sehingga tidak mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, kesadaran warga terhadap risiko banjir tetap rendah meski ancaman semakin meningkat setiap tahun. Kondisi ini menuntut adanya reformasi menyeluruh melalui tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan akuntabel. Dengan pendekatan good governance yang kuat, Kota Bandar Lampung dapat memulai transisi menuju kota yang lebih tangguh terhadap bencana, di mana mitigasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

C. KESIMPULAN

Upaya mitigasi banjir di Kota Bandar Lampung membutuhkan strategi yang tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga terpadu dan didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat. BPBD sebagai ujung tombak penanggulangan bencana memegang peran penting dalam keseluruhan siklus kebencanaan, mulai dari tahap pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Namun, di lapangan, pelaksanaan fungsi ini masih sering terhambat oleh berbagai persoalan struktural seperti keterbatasan anggaran operasional, kurangnya kemampuan teknis aparatur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta penyebaran informasi kebencanaan yang belum sepenuhnya efektif. Hambatan tersebut membuat BPBD belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal, khususnya dalam konteks mitigasi yang membutuhkan pendekatan jangka panjang dan berbasis data. Agar upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif, BPBD perlu memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia, memperkuat komunikasi kebencanaan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Di samping itu, sinergi antara BPBD, pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat merupakan pilar utama dalam membangun sistem pengurangan risiko bencana yang lebih responsif dan preventif

DAFTAR PUSTAKA

- Awusi, Biyan Anugrah, Herman Nayoan, and Jones Tompodung. "KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MANADO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA BANJIR." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).
- Bria, Josua Kurniawan Ivo, Petrus Kase, and Mariayani O. Rene. "PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN MALAKA PADA TAHUN 2024." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* 3 (2025): 139–56.
- Frasetya, Vito, Andy Corry W, Nanang Trenggono, and Purwanto Putra. "KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA KOTA

- BANDAR LAMPUNG.” *Jurnal Komunika* 4, no. 1 (2021): 1–18. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika>.
- Hamka, Muhammad Pardan. “Optimalisasi Penyebaran Informasi Dalam Pencegahan Banjir Di Kota Bandar Lampung Povinsi Lampung.” *IPDN Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*, 2023. <http://eprints.ipdn.ac.id/14296/>.
- Heryati, Sri. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* 2, no. 2 (2020): 139–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>.
- Marta, Dwi Jati, and Tika Pustika Fersari. “Manajemen Bencana Banjir Dalam Meningkatkan Ketahanan Wilayah Oleh BPBD Kota Semarang.” *JURNAL RIPTTEK* 19, no. 1 (2025): 46. <http://ripteck.semarangkota.go.id>.
- Nisa, Khoirun, and Hendra Try Ardianto. “STRATEGI MITIGASI BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCAN DAERAH (BPBD) DALAM UPAYA MENANGGULANGI BANJIR DI KABUPATEN PATI.” *Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro* 1, no. 1 (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Setiawan, Aditiya, Komeyni Rusba, Muhamad Ramdan, Dharma Saputra, and Adji Swandito. “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan.” *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan* 10, no. 1 (2024): 42–48. <https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/index.php/identifikasi>.
- Syuryansyah, Sukendar, and Ditta Andini. “Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Manajemen Bencana Di Tanjung Lesung.” *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* 11, no. 1 (2023): 69–79. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i1.150>.

